

MATRIKS GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

1. **Menyusun Cascading Kinerja** sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah dengan mendorong peningkatan Kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	○ Program Hubungan Industrial ○ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ○ Program Penempatan Tenaga Kerja ○ Program Promosi Penanaman Modal ○ Program Pelayanan Penanaman Modal ○ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase peningkatan serapan tenaga kerja	
			Meningkatnya kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	
			Meningkatkan Peluang Investasi	Jumlah investor terdaftar(PMDN/PMA)	
			Meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Data Terpilah Terkait Isu Gender : - o Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) - o Data Pekerjaan Masyarakat Padang Panjang Berdasarkan Jenis Pekerjaan - o Data Pencari Kerja Di Kota Padang Panjang - Identifikasi Isu Gender Strategis : - o Masyarakat Harus Memenuhi Syarat Batas Usia Yaitu Rentang Usia Bekerja 15 – 65 Tahun - o Adanya Perwako Yang Mengatur Tentang Pedoman Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Dan Harus Terdaftar Dalam Dtks - o Pengambilan Keputusan Investasi/Usaha, Khususnya Pada Skala Umkm, Masih Didominasi Laki-Laki Sebagai	- Belum Adanya Kebijakan Terkait Tenaga Kerja Diatas 65 Tahun Karena Usia Tenaga Kerja Sudah Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Beberapa Sektor Pelatihan Hanya Berfokus Pada Laki-Laki - Adanya Kebijakan Yang Memprioritaskan Kepala Keluarga Karena Adanya Stigma Bahwa Hanya Kepala Keluarga Yang Mencari Nafkah - Tidak Semua Masyarakat Memiliki Akses Dan/Atau Kesadaran Untuk Mengupdate Data Mereka Seperti Data Pekerjaan, Domisili, Dan Data Terkait Lainnya. - Masih Adanya Masyarakat Yang Gaptek Dan Lambat Dalam Menerima Informasi Terkait Program Pemerintah - Pelaksanaan Job Fair Belum Secara Aktif Menargetkan Peningkatan Peserta Pencari Kerja Perempuan - Jenis Dan Kuota Pelatihan Blk/Vokasi Belum Disusun Berdasarkan Analisis Kebutuhan	- Menambahkan Prioritas Penerima Program Kegiatan Pekerja Sektor Informal Bukan Hanya Untuk Kepala Keluarga - Membuka Akses Dan Mempromosikan Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional Secara Aktif Kepada Peserta Perempuan. - Mendorong Perusahaan Mitra Menyediakan Skema Kerja Fleksibel (Paruh Waktu/Work From Anywhere) Yang Ramah Bagi Pencari Kerja Perempuan Dengan Peran Pengasuhan. - Menyusun Basis Data Investor Dan Pelaku Usaha Terpilah Jenis Kelamin Sebagai Dasar Pemantauan. - Menyediakan Klinik/Helpdesk Pendampingan Perizinan (Oss/Nib) Khusus Bagi Pelaku Usaha Perempuan Dan Umkm. - Tersedianya Layanan/Fasilitas Khusus Bagi Lansia, Toilet Ramah Lansia, Ruang Ibu Menyusui Dan Ruang Ramah Anak/Taman Bermain.	- Pd Relevan : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Yang Tercatat Secara Legal. ○ Terdapat Prioritas Sasaran Yaitu Kepala Keluarga, Sehingga Sebagian Pekerja Informal Perempuan Tidak Sepenuhnya Masuk Dalam Data ○ Pencari Kerja/Pekerja Perempuan Memiliki Akses Lebih Rendah Terhadap Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional (Otomotif, Elektronik, Konstruksi, Tik) Dan Lebih Banyak Diarahkan Ke Bidang Tata Boga, Tata Busana, Dan Kecantikan. ○ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Perempuan Tercatat Jauh Lebih Rendah Dibanding Laki-Laki, Termasuk Partisipasi Dalam Bursa Kerja/Job Fair.	Pasar Kerja Yang Mempertimbangkan Minat Dan Potensi Peserta Perempuan Di Bidang Non-Tradisional. - Data Investor Dan Pelaku Usaha Belum Konsisten Dipilah Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilik/Penanggung Jawab Usaha. - Penerima Layanan Pada Mall Pelayanan Publik Seringkali Dilakukan Oleh Lansia Serta Ibu Menyusui Dan Anak-Anak		

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Menambahkan Prioritas Penerima Program Kegiatan Pekerja Sektor Informal Bukan Hanya Untuk Kepala Keluarga	Program Hubungan Industrial	Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Membuka Akses Dan Mempromosikan Pelatihan Vokasi Bidang Teknis/Non-Tradisional Secara Aktif Kepada Peserta Perempuan.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2 Usulan Pokir	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mendorong Perusahaan Mitra Menyediakan Skema Kerja Fleksibel (Paruh Waktu/Work From Anywhere) Yang Ramah Bagi Pencari Kerja Perempuan Dengan Peran Pengasuhan.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menyusun Basis Data Investor Dan Pelaku Usaha Terpilah Jenis	Program Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Kelamin Sebagai Dasar Pemantauan		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Satu Pintu
Menyediakan Klinik/Helpdesk Pendampingan Perizinan (Oss/Nib) Khusus Bagi Pelaku Usaha Perempuan Dan Umkm.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tersedianya Layanan/Fasilitas Khusus Bagi Lansia, Toilet Ramah Lansia, Ruang Ibu Menyusui Dan Ruang Ramah Anak/Taman Bermain.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu